



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 3 /VI.02/HK/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Nama	: Drs. MINHAIRIN, M.M.
N I P	: 19620603 198511 1 001
Pangkat/golongan	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
 - melaksanakan fungsi BUD;
 - menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Januari 2018

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- Ketua BPK RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
- Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
- Sdr. Drs. Minhairin, M.M. di Telukbetung.